

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197).

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Buku

Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*. Kencana. Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

A`an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika. Jakarta.

- Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid. 2015. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Lembaga Pengembangan Pendidikan Press. Universitas Negeri Jakarta.
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Intrans Publishing Wisma Kalimetro. Malang.
- Elwi Danil. 2012. *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantas*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Gunawan A. Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen*. Genta Press. Yogyakarta.
- Gusti Ketut Ariawan. 2015. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Udayana. Bali.
- Hadari Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Henry Priono. 2018. *Korupsi (Melacak arti, menyimak implikasi)*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Husein Umar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji DKK. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi*

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch.
Jakarta Selatan.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*.
Setara Press. Malang.
- Mahmuddin. 2003. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Gerakan Rakyat Anti
Korupsi (GeRAK) Indonesia. Jakarta.
- Maruar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi
Press. Jakarta.
- Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nandang Alamsah dan dkk. 2017. *Teori & Praktek Kewenangan*. Pandiva
Buku. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Precana.
Jakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*,
Setara Press. Malang.

Skripsi

Ariani Sugiarti. 2017. *Analisis Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Humprey Ejike Jefferson (Studi Analisis Dikaitkan Dengan Putusan MK No.107/PUU-XIII/2015)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

Tatiek Sri Djatmiati. 2004. "*Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*". Disertasi. Universitas Airlangga.

Wahyu Agam. 2019. "*Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi*". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri.

Wahyudi Dasopang. 2019. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal

Ateng Syafrudin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". *Jurnal Pro Justisia Edisi IV* 2000. Universitas Parahyangan. Bandung.

A'an Efendi. "Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yudisial*. Vol. 12 Nomor 3 Desember 2019.

Dika Yudanto dan Nourma Dewi. "Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 10. Nomor 02 Agustus 2016.

Enrico Parulian Simanjuntak. "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 7 Nomor 2. Juli 2018.

Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1. Juni 2014.

Tri Mulyani. "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Humani*. Universitas Hasanuddin. Vol. 6. Nomor 1 Januari 2016.

Tedi Sudrajat. "Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal Civil Service*. Vol 11. No 2. November 2017.

Internet

<https://kbbi.web.id/bebas%20tugas>. Diakses tanggal 20 Juli 2021.

<https://kbbi.web.id/alih> , Diakses pada tanggal 9 September 2021.

<https://kbbi.web.id/status> , Diakses pada tanggal 9 September 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan%20wewenang>,

Diakses pada tanggal 22 September 2021.

<https://kbbi.web.id/wenang>, Diakses pada tanggal 23 September 2021.

Melalui Kanal Youtube Sekretariat Presiden. Senin (17/5/2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=SxPh2Re9YBQ>. Diakses tanggal 21 Juli 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-5651967/ombudsman-putar-balik-putusan-75-pegawai-kpk-yang-diberhentikan>. Diakses tanggal 22 Juli 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/17010861/kpk-berhentikan-56-pegawai-yang-tak-lolos-twk-per-30-september-2021>. Diakses tanggal 21 September 2021.

<https://wartakepri.co.id/2021/09/30/tambah-1-lagi-total-pimpinan-kpk-resmi-pecat-57-pegawai-per-30-september-2021/> . Diakses tanggal 2 Oktober 2021.